



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH:
PENDEKATAN REGRESI DATA PANEL**

Andjar Prasetyo

Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik, Magelang, e-mail: andjar.prasetyo@gmail.go.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
30 September 2015

Dinyatakan Dapat Dimuat
23 Desember 2015

KATA KUNCI:

pengaruh pengeluaran
pemerintah,
tingkat kemiskinan 35
kabupaten kota,
provinsi jawa tengah,
regresi data panel

ABSTRAK

This research aims to find out and analyse the consumption expenditures and investment expenditures of government spending as well as the realization of private sector investment. Results of the analysis are then used to determine its effect on the poverty rate in 35 districts of Central Java province in 2008 in the period up to the year 2013 separately. Methods of analysis using regression data panel because the data in the form of cross section and time series by the method of Fixed Effect Model. The three main variables of consumption expenditures, investment expenditures and realization private sector investment. In this study the consumption expenditures specified in goods and services expenditures, grants expenditures, social assistance expenditures, while specified in order to investment expenditures are tools and machinery expenditures, buildings expenditures, irrigation and road network expenditures, other fixed assets expenditures. The development of the hypothesis of this research is thought to have negative influence or relationship upside-down between government spending and private investment towards the realization of the poverty rate in 35 Districts Of Central Java province in 2008 year period up to the year 2013. From the results of the test precision of Ftest value model of 97,98 percent on levels of poverty. The influence of government spending and private investment towards the realization of poverty levels obtained equation: $Kmskn = 158,431796626 - 1,4886 Bljbrg - 1,8240 Bljhbah + 2,4067 Bansos - 2,0880 Peralmes - 5,3047 Banged + 3,09406 Jairjar - 2,93462 Asttl + 5,9541 Reinsws$. Variable goods and services expenditures, grants expenditures, machine expenditures, building expenditures, other fixed assets expenditures, realization of private sector investment, have inverted the relationship to the level of poverty, however social assistance expenditures, the streets irrigation network expenditures, and the realization of private sector investment has a positive influence. Variables that have a negative relationship needs to be constantly improved and variables have positive relationships need to do more research.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah dari belanja konsumsi dan belanja investasi serta realisasi investasi sektor swasta. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 secara terpisah. Metode analisis menggunakan regresi data panel karena data berupa *cross section* dan *time series* dengan Metode Fixed Effect Model. Tiga variabel utama yaitu belanja konsumsi, belanja investasi dan realisasi investasi sektor swasta. Dalam penelitian ini belanja konsumsi dirinci dalam belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, sedangkan belanja investasi dirinci dalam belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Pengembangan hipotesa dari penelitian ini adalah diduga ada pengaruh negatif atau hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dari hasil uji ketepatan model nilai F_{hitung} sebesar 97,98 persen pada tingkat kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan diperoleh persamaan: $Kmskn = 158,431796626 - 1,4886 Bljbrg - 1,8240 Bljhbah + 2,4067 Bansos - 2,0880 Peralmes - 5,3047 Banged + 3,09406 Jairjar - 2,93462 Asttl + 5,9541 Reinsws$. Variabel belanja barang, belanja hibah, belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja aset tetap lainnya, realisasi investasi sektor swasta, memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan, namun bantuan sosial, belanja jalan, irigasi dan jaringan, realisasi investasi sektor swasta memiliki pengaruh positif. Variabel yang memiliki hubungan negatif perlu terus ditingkatkan dan variabel yang memiliki hubungan positif perlu dilakukan penelitian lebih lanjut..

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor setelah dikurangi impor. Kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah didalam perekonomian dalam rangka mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Intervensi pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah. Bentuk hubungan negatif yang terjadi di Indonesia antara peningkatan (anggaran belanja) dengan kemiskinan ini sejalan dengan pemikiran ekonom-ekonom aliran Keynesian.

Dasar dari model pengembangan pertumbuhan dari sektor publik adalah perubahan struktur perekonomian dan kebutuhan untuk berkembang. Preston & Tracy, (2009:101) menjelaskan dalam sektor publik dalam masyarakat memiliki dua atribut: *Nonexcludability*, yang berarti produsen tidak dapat mencegah penggunaan yang baik oleh orang lain, dan *nonrivalry*, yang berarti bahwa banyak orang dapat menggunakan baik secara bersamaan. Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran publik mungkin berhubungan dengan pola pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat. Kedua ekonom tersebut juga mengatakan bahwa model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Todaro (2000:18) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya bukan merupakan satu-satunya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih lanjut menurut Todaro (2000:21-24) keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: (1) perkembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan.

Arsyad (1988:172) menyatakan bahwa penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan pembagian pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Lebih lanjut ketidakmerataan diungkapkan dalam berbagai permasalahan seperti ketidakmerataan kekuasaan,

prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain. Di negara-negara sedang berkembang, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbkannya yang lain. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Product* (GNP) yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil-hasilnya. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2000:177-178).

Myrdal (1976:56) berpendapat, adakalanya daerah-daerah yang maju memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tersebut, dalam banyak hal mereka melakukannya pada saat mereka hendak memulainya memanfaatkan kondisi menguntungkan yang kompetitif. Pusat-pusat perdagangan sudah tentu akan memilih berlokasi di tempat-tempat dimana terdapat kondisi alamiah yang cukup baik bagi pembangunan pelabuhan, dan pusat-pusat industri berat biasanya akan memilih tempat yang tidak terlalu jauh dari sumber batubara dan baja. Lebih lanjut Myrdal (1976:56) mengatakan, secara umum dapat dikatakan bahwa daya tarik suatu daerah dimulai dari sejarah masa lalu yang bersifat kebetulan bahwa pada masa lalu pernah ada sesuatu kegiatan ekonomi yang dimulai di daerah itu dan ternyata berhasil, dan tidak dimulai di daerah lain dimana sesuatu kegiatan ekonomi tersebut sebenarnya dapat juga dimulai dan mungkin akan membawa hasil yang lebih baik. Dan dikemudian hari di daerah yang berhasil, bertambahnya keunggulan-keunggulan lain seperti terlatihnya golongan pekerja dalam berbagai macam keterampilan, mudahnya komunikasi, berkembangnya rasa bertumbuh dan terbukanya kesempatan-kesempatan yang luas, dan semangat membangun perusahaan-perusahaan baru, bertambahnya fasilitas-fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, jalan dan lain-lain yang memperkuat dan menopang pertumbuhan yang terus berlanjut di daerah tersebut.

Di sisi lain daerah-daerah yang tidak mempunyai keunggulan mengalami stagnasi dan bahkan tidak mungkin akan mengalami kemunduran. Berdasarkan asumsi yang sama daerah-daerah miskin, apabila dibiarkan maka mereka tidak akan mampu memiliki fasilitas-fasilitas publik yang baik. Penduduk yang hidup di daerah-daerah seperti ini cenderung memiliki pemikiran yang lebih primitif, mengeramatkan unsur-unsur kebudayaan tradisional dengan tabu, dan mereka lebih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib dan pada umumnya kurang rasional. Keseluruhan

sistem pemikiran mereka sedemikian terpatri dengan kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mereka menjadi kurang peka terhadap aspirasi-aspirasi eksperimen dari masyarakat dari daerah lain (Myrdal, 1976:60).

Masalah penting lain yang muncul adalah kemiskinan, Jean & Gareth, (2004:339-340) menjelaskan, kemiskinan merupakan masalah yang sudah lama ada. Bahkan pada tahun 1776 Adam Smith mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya kebutuhan. Belanja pemerintah baik untuk konsumsi dan investasi memiliki peran utama dan strategis proses pembangunan. dalam pengentasan kemiskinan. Pendekatan Keynesian, menjelaskan bahwa belanja publik dapat meningkatkan permintaan agregat yang lebih merangsang pertumbuhan ekonomi dan ketenaga kerjaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah positif berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja baik operasi maupun modal di dalam APBD untuk melaksanakan rencana pembangunan di daerah dalam bentuk proyek-proyek dari berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi dan diharapkan benar-benar langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diarahkan supaya berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Belanja modal ini dapat berupa pembangunan gedung, sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan bersekolah. Jadi, yang dipikirkan saat ini bukan hanya alokasi tinggi bagi kemajuan bangsa yang dilihat dari kekayaan, melainkan juga pengalokasian dana yang lebih tinggi bagi belanja untuk peningkatan kesejahteraan. (World Bank, 2006).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Penjabaran belanja pemerintah di Indonesia dilakukan melalui APBN untuk pemerintah Pusat dan APBD untuk Pemerintah Daerah. Struktur belanja yang ada dalam APBD saat ini terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah. Struktur ini juga dilaksanakan pada 35 Kabupaten Kota dalam Provinsi Jawa Tengah, yang menggunakan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran belanja daerah ini ditentukan oleh beberapa

sumber pendapatan daerah diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber-sumber lainnya yang sah. Penerimaan Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Keterbaruan dari studi ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan menjelaskan adanya pengaruh pengeluaran publik terhadap pengentasan kemiskinan. Namun penelitian yang dilakukan masih terbatas pada penelitian yang hanya meneliti salah satu dari pengaruh pengeluaran publik sehingga tidak bisa melihat secara langsung dalam satu penelitian yang mengevaluasi pengeluaran publik terhadap kemiskinan. Disamping itu dalam penelitian terdahulu menganalisa pengeluaran pemerintah yang terakumulasi atau tidak dilakukan perincian pengeluaran pemerintah sampai pada pos-pos pengeluaran yang tersedia dalam struktur APBD dimana realisasi penerimaan APBD di 35 Kabupaten Kota yang selalu meningkat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian dengan melihat fenomena gap yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan maka rumusan pertanyaan penelitian adalah bagaimana analisis pengeluaran pemerintah, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan realisasi sektor swasta pada tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008 sampai dengan 2013.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi pengaruh pengeluaran pemerintah dan realisasi sektor swasta pada tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008 sampai dengan 2013.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi Publik.

Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pengambilan keputusan guna menentukan kebijaksanaan bagi pihak pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi khususnya dalam meningkatkan peran dan strategi pengeluaran pemerintah dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah utamanya dalam pengentasan kemiskinan. Disamping itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi penelitian lain yang serupa.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengeluaran Pemerintah

Teori Keynesian menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor bersih. Pertumbuhan pendapatan tersebut digunakan sebagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur

pada peningkatan pendapatan nasional maka diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Terapan tersebut jelas memberikan peran intervensi pemerintah dalam tataran perekonomian makro daerah termasuk didalamnya tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Dalam perkembangannya pengeluaran pemerintah dari perspektif ekonomi publik diimplementasikan dalam belanja konsumsi dan belanja investasi. Kedua belanja tersebut memiliki kapasitas dan kemampuan dalam membentuk pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memberikan peningkatan terhadap pendapatan. Dampak dari peningkatan pendapatan dapat dilihat dari indikator berkurangnya penduduk miskin.

2.2. Belanja Konsumsi

Mankiw (2000) menjelaskan bahwa "Konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (*Non Durable Goods*). Kedua adalah barang tahan lama (*Durable Goods*). Ketiga, jasa (*Services*) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan. Diulio (1993) membagi Konsumsi menjadi 2 (dua) yakni konsumsi rutin dan konsumsi sementara. Deliarnov (1995) dijelaskan bahwa bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa guna mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan adalah konsumsi.

Konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya menurut Samuelson & Nordhaus (1996). Barang konsumsi ini terdiri dari barang konsumsi sekali habis dan barang konsumsi yang dapat dipergunakan lebih dari satu kali (Nopirin, 1997). Badan Pusat Statistik (2012) menyatakan pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi non makanan.

Ada beberapa perdebatan tentang konsep Teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup, dan teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif. Teori dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh M Friedman. Menurut teori ini pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pengertian pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya (Mangkoesebroto, 1998:72). Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan sementara (Suparmoko, 1991:70). Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat

konsumsi, menekan koefisien pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan, seperti perubahan dalam investasi, ekspor, maupun pengeluaran-pengeluaran lain. (Suparmoko, 1991:73-74).

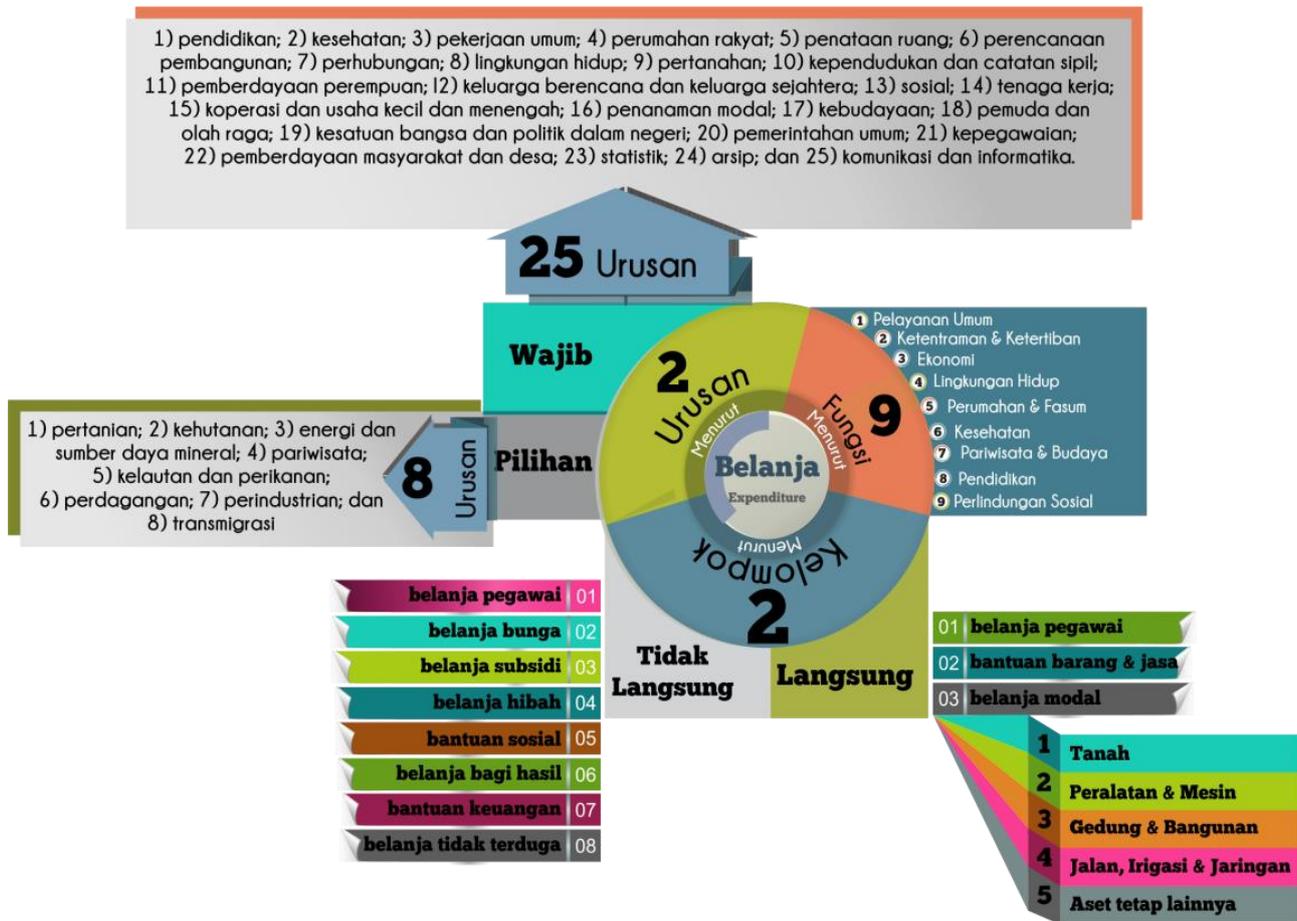
James Dusenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya (Reksoprayitno, 2000). Dalam teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu: (1) Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. (2) Pengeluaran konsumsi adalah irreversibel (Mangkoesebroto, 1998:70).

Dalam konteks konsumsi publik, implimentasi secara makro dilakukan oleh pemerintah dengan model Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Definisi dari belanja daerah menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun. Definisi lainnya mengenai belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Halim (2003:145), belanja daerah adalah "pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya". Menurut Halim dan Nasir (2006 : 44), belanja daerah adalah "semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Dari semua definisi tersebut, terdapat dua hal utama yang patut untuk dilihat, yaitu bahwa belanja daerah adalah suatu bentuk kompensasi finansial yang mengurangi nilai kekayaan bersih suatu daerah dan yang kedua bahwa belanja daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan pelayanan publik.

Untuk itulah, selain dari sisi ekonomi publik, maka belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Definisi lain,

Gambar 1 Rangkuman Belanja Pemerintah Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006



Sumber : Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, diringkas.

belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim (2004:18), belanja daerah digolongkan menjadi 4 (empat) yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

2.3. Belanja Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional, yang merupakan pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung kepada aliran modal bagi usaha produktif. Ada sementara ahli yang mengatakan bahwa ekspor dan investasi merupakan "engine of growth". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh

peningkatan ekspor dan investasi, (Sutawijaya dan Zulfahmi, 2013).

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian, (Sasana, 2008).

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan, investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah mendapat perhatian dan penekanan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*).

Dari berbagai teori ekonomi menjelaskan bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Meningkatnya tingkat bunga akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran investasi, dan sebaliknya

menurunnya tingkat bunga akan mengakibatkan bertambahnya pengeluaran investasi. Sukirno (2002) mengatakan bahwa tingkat suku bunga adalah faktor yang menentukan besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh masyarakat (swasta). Menurunnya tingkat suku bunga akan menaikkan permintaan investasi. Suku bunga yang tinggi dapat merupakan hambatan bagi pertumbuhan sektor swasta maupun publik. Oleh karena itu suku bunga rendah merupakan syarat penting untuk mendorong investasi swasta.

Beberapa penelitian terdahulu tentang investasi swasta yang telah dilakukan yakni oleh Radianto (1995) yang menunjukkan bahwa variabel PDRB dan variabel tingkat suku bunga tidak mampu menjelaskan fenomena investasi swasta di Maluku, hanya variabel angkatan kerja yang mampu menjelaskan variasi investasi swasta. Dalam penelitian Kodoatie (1998) variabel penanaman modal tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan, nilai tukar, dan kebijaksanaan reformasi di bidang investasi berpengaruh terhadap PMA. Teori Investasi Neo Klasik menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB riil berpengaruh positif terhadap investasi swasta (Wai and Wong, 1982; Greene dan Villanueva, 1991; Fielding, 1997). Hal ini juga dikenal sebagai "efek akselerator" (Ouattara, 2000). Selain itu, nilai modal yang diinginkan oleh sebuah perusahaan berpengaruh secara positif pada tingkat permintaan (Bayai dan Nyangara, 2013).

Di Indonesia investasi swasta menurut sumbernya secara umum terdiri dari dua sumber yaitu berasal dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) dan berasal dari dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala nasional. Oleh karena itu dalam penelitian ini juga dimasukkan variabel investasi dari sektor swasta dengan data yang bersumber dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari berbagai hasil penelitian tersebut investasi swasta memiliki peran strategis dan merupakan komponen penting dalam mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terlihat hubungan antara tiga cara mengukur efektivitas anggaran pembangunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, yaitu :

1. Dengan melihat seberapa besar pemerintah menentukan alokasi nilai belanja untuk kepentingan publik ternyata masih rendah efektivitasnya;
2. Dengan melihat seberapa besar nilai belanja untuk kepentingan publik tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dengan optimal juga masih rendah efektivitasnya. Hal ini didasarkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk belanja modal sebagai bagian dari belanja pembangunan;
3. Dengan melihat seberapa besar optimalisasi nilai belanja publik mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan yang bermanfaat bagi masyarakat

sehingga menambah kesejahteraan masyarakat juga masih rendah efektivitasnya. Belanja anggaran pembangunan hanya mampu mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi eksklusif dan belum berkualitas.

Pada dasarnya pengertian efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002:h.139), menyatakan : "*doing the right things is more important than doing the things right*". Selanjutnya dijelaskan bahwa: "*effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right*" (efektifitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga "*effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency meanshow do we mix various resources properly*" (efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).

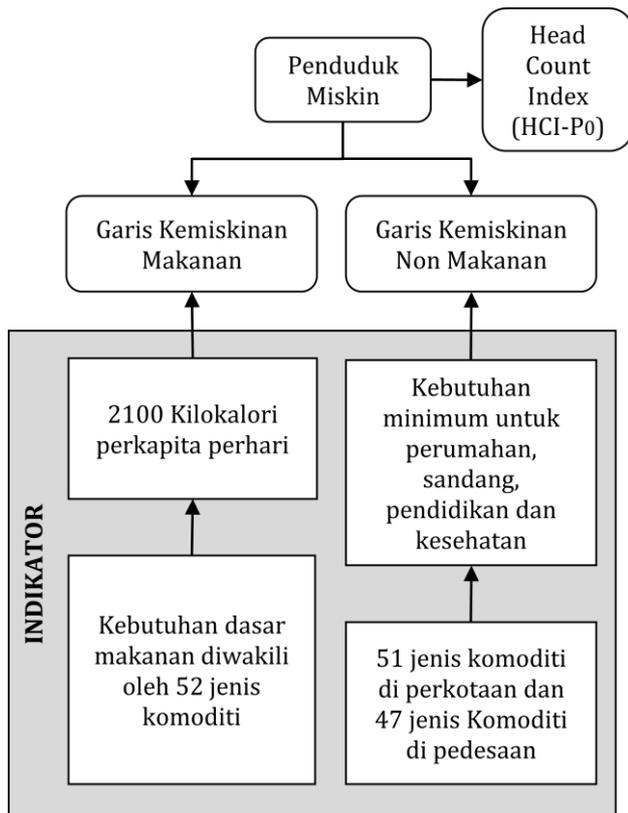
Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya (input), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006).

2.4. Konsep Kemiskinan

Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah deprivation dalam kesejahteraan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Jadi

Gambar 2 Panel Modul Konsumsi dan Kor



Sumber : BPS

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. (lihat gambar).

2.5. Hasil Penelitian terdahulu

Anis Setiyawati (2007) Belanja Pembangunan berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap Kemiskinan dan pengangguran. Irawati (2011), menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang pro poor khususnya terkait dengan bidang sosial dan infrastruktur masih harus ditingkatkan dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah di masing-masing provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin khususnya sehingga bisa memperbaiki tingkat kemiskinan. Sodik (2007) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang berimplikasi pada pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sinurat, (2013), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah terhadap sektor ekonomi, infrastruktur dan pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sedangkan untuk sektor kesehatan malah sebaliknya diduga belanja pemerintah untuk kesehatan baru menurunkan tingkat kemiskinan untuk jangka panjang.

Rashid dan Sara, (2010), menjelaskan hubungan negatif antara pemerintah pengeluaran dan

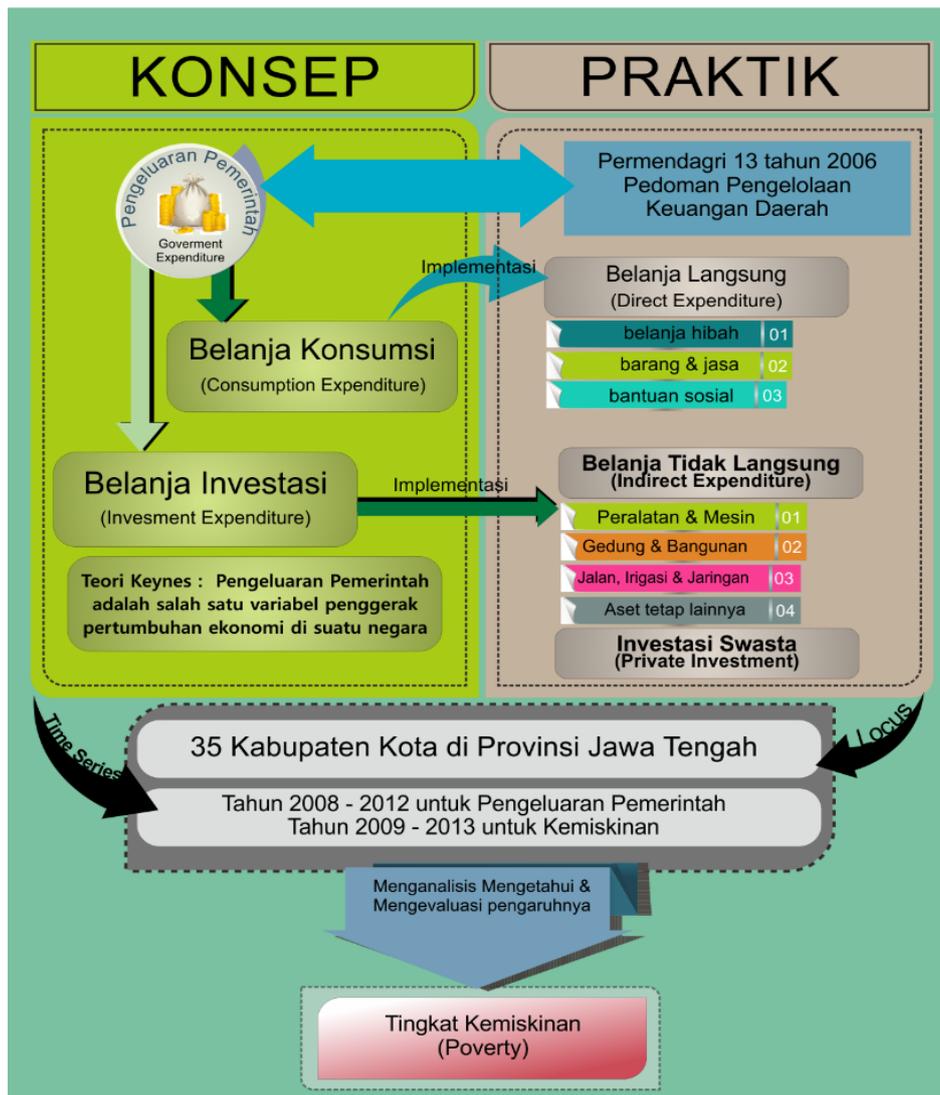
kemiskinan dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Jadi masalah nyata yang bersangkutan adalah komposisi pengeluaran pemerintah. Iskandar, (2014), menyatakan peningkatan jumlah Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto memberi dampak positif terhadap penduduk miskin di Aceh, karena ketersediaan infrastruktur yang memadai yang merupakan dampak positif dari peningkatan belanja modal pemerintah akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Sushanta, (2008), menjelaskan intervensi pemerintah diperlukan untuk menciptakan lembaga dan pasar sebagai fungsi dalam mengkoordinasikan dan penghubung antara pasar yang lebih besar di daerah perkotaan dengan barang-barang yang diproduksi di sektor pedesaan. Nazar & Mahmoud, (2013), menyatakan adanya kebijakan konstruktif pengeluaran pemerintah seperti yang dilakukan pemerintah provinsi Sistan and Baluchestan Iran mampu mengurangi kemiskinan. Peter & Diego, (2013), menjelaskan bahwa ekonomi AS mungkin cepat rentan terhadap setiap pengurangan investasi swasta, kecuali disertai peningkatan seiring, kompensasi relatif tingkat pengeluaran pemerintah. Degol, (2011), menjelaskan kerangka *heterodoks* memiliki kesempatan yang lebih baik mempromosikan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Tejo, (2011), menggunakan pertumbuhan pengeluaran secara keseluruhan tidak memiliki hubungan yang negatif dengan angka kemiskinan. Mthuli, John, Kjell, (2013), menunjukkan bahwa transfer tunai bersyarat, dan pengeluaran (untuk pendidikan, misalnya memberikan hasil kami bahwa pendidikan penting dalam mengurangi kemiskinan) yang efektif jaring pengaman dan tuas pengurangan kemiskinan dan redistribusi.

2.6. Kerangka Pemikiran

Belanja konsumsi dan belanja investasi yang terdiri dari tujuh variabel digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa variabel dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak dimasukan dalam penelitian karena diasumsikan tidak memiliki pengaruh secara langsung. Variabel dalam penelitian ini adalah Belanja Konsumsi meliputi belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sedangkan dalam belanja investasi variabelnya meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi, belanja aset tetap lainnya dan realisasi sektor swasta.

Gambar 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan investasi swasta terhadap tingkat Kemiskinan di 35 Kabupaten Kota Jawa Tengah tahun 2008-2013



Sumber : BPS

2.7. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga ada pengaruh pengeluaran pemerintah baik pengeluaran konsumsi (belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial) maupun pengeluaran investasi (belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja Jalan, jaringan dan irigasi dan belanja aset tetap lainnya) dan realisasi investasi sektor swasta terhadap tingkat kemiskinan 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dijelaskan hubungan fungsional antara pengeluaran pemerintah (belanja konsumsi dan belanja investasi) dan investasi swasta dengan tingkat kemiskinan secara terpisah dalam bentuk persamaan umum (*general function*) sebagai berikut :

$$Y = f(X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{21}, X_{22}, X_{23}, X_{24}, X_3)$$

1. $X_{11} = f'_{11} < 0,$

Variabel Belanja Barang (X_{11}) yang merupakan bagian dari Belanja Konsumsi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).

2. $X_{12} = f'_{12} < 0,$

Variabel Belanja Hibah (X_{12}) yang merupakan bagian Belanja Konsumsi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).

3. $X_{13} = f'_{13} < 0,$

Variabel Bantuan Sosial (X_{13}) yang merupakan bagian Belanja Konsumsi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).

4. $X_{21} = f'_{21} < 0,$

Variabel Belanja Peralatan dan Mesin (X_{21}) yang merupakan bagian Belanja Investasi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).

5. $X_{22} = f'_{22} < 0,$

Variabel Belanja Bangunan dan Gedung (X_{22}) yang merupakan bagian Belanja Investasi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).

6. $X_{23} = f'_{23} < 0$,
Variabel Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (X_{23}) yang merupakan bagian Belanja Investasi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).
7. $X_{24} = f'_{24} < 0$,
Variabel Belanja Aset Tetap Lainnya (X_{24}) yang merupakan bagian Belanja Investasi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).
8. $X_3 = f'_3 < 0$,
Variabel Realisasi Investasi Swasta (X_3) yang merupakan bagian Belanja Investasi Pemerintah berpengaruh negatif atau memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan (Y).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 35 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian mulai tahun 2008 sampai dengan 2013. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan digunakan sebagai sampel, yaitu 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sumber data ini adalah data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, artikel-artikel, penelusuran pustaka dan dokumen resmi dari instansi terkait.

Konsep dari variabel yang terdapat dalam penelitian ini secara umum untuk pengeluaran pemerintah adalah kelompok belanja pemerintah baik langsung maupun tidak langsung seperti yang tertera dalam Rangkuman Belanja Pemerintah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan investasi sektor swasta yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang berada di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan definisi operasional dalam penelitian ini adalah; **Kemiskinan**: Jumlah penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota, variabel ini menggunakan singkatan Kmskn. **Belanja Barang**: Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah variabel ini menggunakan singkatan Bljbrg. **Belanja Hibah**: digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, variabel ini menggunakan singkatan BljHbah. **Belanja Bantuan Sosial** : digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Variabel ini

menggunakan singkatan Bansos. **Belanja Peralatan dan Mesin**: pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai, variabel menggunakan singkatan Peralmes. **Belanja Bangunan dan Gedung**: pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai, variabel menggunakan singkatan Banged. **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**: pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai, variabel ini menggunakan singkatan Jajrjar. **Belanja Aset Tetap Lainnya**: digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah, variabel ini menggunakan singkatan Asttl.

Variabel lainnya tidak dimasukkan dalam studi ini karena variabel belanja baik tidak langsung dan langsung seperti yang tertera dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diasumsikan tidak memiliki implikasi yang langsung terhadap variabel tingkat kemiskinan. **Realisasi Investasi**: Realisasi Investasi di 35 Kabupaten Kota dalam Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang berasal dari data realisasi investasi di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan 2013 dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, variabel ini menggunakan singkatan Reinsws.

3.1. Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif menganalisa dengan menarasikan hasil data yang telah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar. Statistik kuantitatif kajian ini meneliti secara kuantitatif tentang pengaruh belanja konsumsi dan belanja investasi dilihat dari kemampuan masing-masing variabel yang terdapat dalam kedua bagian belanja tersebut. Namun tidak semua sub bagian belanja yang ada dipergunakan untuk mengukur

tingkat kemiskinan. Adapun desain penelitian mengenai pengeluaran pemerintah dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Y : fungsi dari Pengeluaran Pemerintah dan investasi swasta, yang terdiri dari tingkat kemiskinan.

$$X_1 = X_{11}, X_{12}, X_{13}$$

Pengeluaran Konsumsi (X_1) berasal dari komponen belanja langsung dari struktur Belanja APBD yang terdiri dari Belanja Barang (X_{11}), Belanja Hibah (X_{12}), Belanja Bantuan Sosial (X_{13}).

$$X_2 = X_{21}, X_{22}, X_{23}, X_{24}$$

Belanja Investasi (X_2) berasal dari komponen Belanja Langsung dalam struktur belanja APBD yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin (X_{21}), Belanja Gedung dan Bangunan (X_{22}), Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (X_{23}) dan Belanja Aset Tetap Lainnya (X_{24}), sedangkan X_3 adalah Realisasi Investasi Swasta.

$$Y = f(X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{21}, X_{22}, X_{23}, X_{24}, X_3)$$

Jumlah Penduduk Miskin (Y) merupakan fungsi dari Belanja Barang (X_{11}), Belanja Hibah (X_{12}), Belanja Bantuan Sosial (X_{13}), Belanja Peralatan dan Mesin (X_{21}), Belanja Gedung dan Bangunan (X_{22}), Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (X_{23}) dan Belanja Aset Tetap Lainnya (X_{24}), Realisasi Investasi Swasta (X_3) pada 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan 2013.

3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas atau tidak maka dengan membandingkan nilai R-squared dan tabel X^2 :

- Jika nilai R-squared > X^2 tabel, maka tidak lolos uji heteroskedastisitas
- Jika nilai R-squared < X^2 tabel, maka lolos uji heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji *Durbin-Watson*. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari $JB_{hitung} > Chi Square_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Jika hasil dari $JB_{hitung} < Chi Square_{tabel}$, maka H_0 diterima.

3.3. Perumusan Persamaan Regresi

$$K_{miskin} = \alpha - b_{11}Bljbrg_{it} - b_{12}BljHbah_{it} - b_{13}Bansos_{it} - b_{21}Peralmes_{it} - b_{22}Banged_{it} - b_{23}Jairjar_{it} - b_{24}Astt_{it} - b_3Reinsw_{it} - e$$

Koefisien determinasi (R^2) mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel-variabel bebas (*independent variables*) dalam menjelaskan perubahan pada variabel tidak bebas (*dependent variables*) secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya.

3.4. Uji Hipotesis

Pengujian F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi dari semua variabel bebas. Uji T-stat dilakukan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam uji ini, suatu koefisien disebut signifikan secara statistik jika t-stat berada pada daerah kritis yang dibatasi oleh nilai t-tabel sesuai dengan tingkat signifikansi tertentu.

Hipotesisnya adalah :

H_0 : $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8 = 0$

tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8 \neq 0$

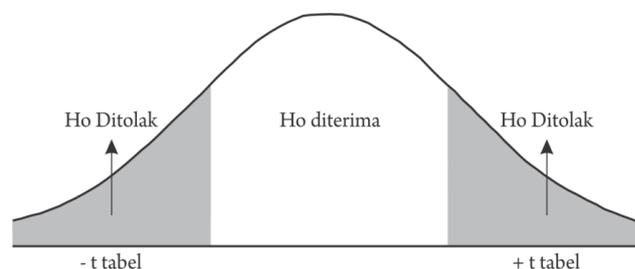
satu variabel $\neq 0$, maka Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

ada pengaruh negatif variabel bebas terhadap variabel terikat.

Jika : $t_{-stat} > t_{-tabel}$: H_0 ditolak, H_a diterima

$t_{-stat} < t_{-tabel}$: H_0 diterima, H_a ditolak

kriteria pengujian :



H_0 diterima jika ρ_{value} (tingkat signifikan) > 0,05

H_1 ditolak jika ρ_{value} (tingkat signifikan) < 0,05.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 (*dalam ribuan*)

Daerah	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab Banjarnegara	869,78	875,17	868,91	875,21	890,96	880,92
Kab Banyumas	1.503,26	1.510,10	1.554,53	1.578,13	1.603,04	1.605,58
Kab Batang	682,56	686,02	706,76	713,94	728,58	729,92
Kab Blora	835,16	838,16	829,73	833,79	847,13	844,44
Kab Boyolali	938,47	943,98	930,53	936,82	953,32	951,82
Kab Brebes	1.788,69	1.800,96	1.733,87	1.742,53	1.770,48	1.764,65
Kab Cilacap	1.738,60	1.744,13	1.748,71	1.755,27	1.679,86	1.676,09
Kab Demak	1.034,29	1.042,93	1.064,58	1.067,99	1.091,38	1.094,47
Kab Grobogan	1.336,32	1.345,88	1.308,70	1.316,69	1.339,13	1.336,30
Kab Jepara	1.090,84	1.107,97	1.097,28	1.124,20	1.144,92	1.153,21
Kab Karanganyar	812,42	819,19	813,20	825,67	838,76	840,17
Kab Kebumen	1.215,80	1.222,54	1.159,93	1.162,29	1.181,68	1.176,72
Kab Kendal	952,01	965,81	900,31	908,53	926,33	926,81
Kab Klaten	1.133,01	1.136,83	1.130,05	1.135,20	1.153,05	1.148,99
Kab Kudus	786,27	797,62	777,44	788,26	807,01	810,81
Kab Magelang	1.170,89	1.180,22	1.181,72	1.193,57	1.219,37	1.221,68
Kab Pati	1.171,61	1.175,23	1.190,99	1.198,53	1.219,99	1.218,02
Kab Pekalongan	851,70	858,97	838,62	845,47	861,37	861,08
Kab Pemalang	1.375,24	1.391,28	1.261,35	1.264,54	1.285,02	1.279,60
Kab Purbalingga	828,13	834,16	848,95	858,80	877,49	879,88
Kab Purworejo	722,29	724,97	695,43	696,14	708,48	705,48
Kab Rembang	575,64	578,23	591,36	597,26	608,55	608,90
Kab Semarang	911,22	921,87	930,73	938,80	968,38	974,09
Kab Sragen	871,95	877,40	883,46	887,72	875,28	871,99
Kab Sukoharjo	826,70	833,58	824,24	832,09	848,72	849,51
Kab Tegal	1.415,63	1.420,53	1.394,84	1.399,79	1.421,00	1.415,01
Kab Temanggung	707,71	714,41	708,55	715,91	730,72	731,91
Kab Wonogiri	982,73	985,02	928,90	929,87	946,37	942,38
Kab Wonosobo	757,75	760,82	754,88	758,99	771,45	769,32
Kota Magelang	134,62	137,06	59,03	118,61	120,45	119,94
Kota Pekalongan	275,24	277,07	281,43	284,41	290,35	290,87
Kota Salatiga	178,45	182,23	170,33	173,06	177,48	178,59
Kota Semarang	1.511,24	1.533,69	1.555,98	1.585,42	1.629,92	1.644,80
Kota Surakarta	522,94	528,20	499,34	501,65	509,58	507,83
Kota Tegal	240,50	241,07	239,60	240,78	244,63	243,86
Jumlah	32.751,65	32.995,28	32.525,46	32.787,95	33.272,22	33.257,66

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2009-2014, BPS Provinsi Jawa Tengah

3.5. Uji Statistik

Metode analisis data yang digunakan adalah Data Panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Obyek penelitian adalah Tingkat Kemiskinan (Y) sebagai dependen variabel dan sebagai independen variabel adalah Belanja Konsumsi (X_1).

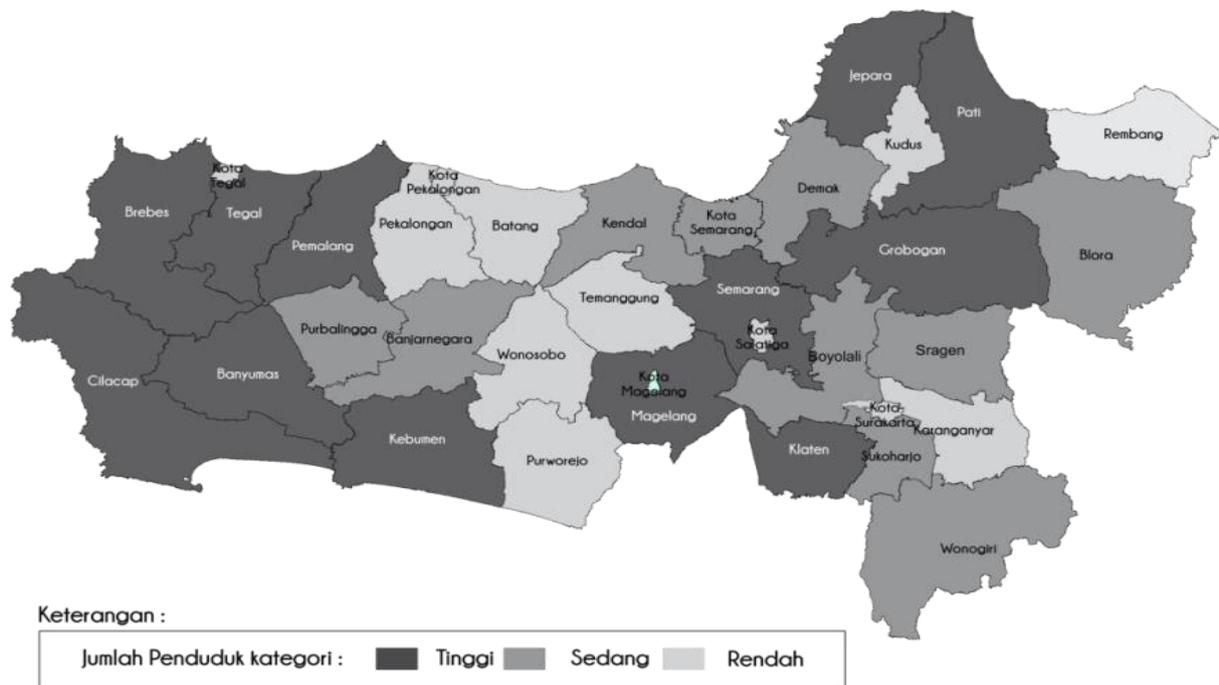
$$Y = \alpha - b_{11}X_{11it} - b_{12}X_{12it} - b_{13}X_{13it} - b_{21}X_{21it} - b_{22}X_{22it} - b_{23}X_{23it} - b_{24}X_{24it} - b_3X_{3it} - e$$

Keterangan:

Y = Variabel Kemiskinan diberi kode Kmiskan
A = Konstanta

3.5.1. Model Regresi Data Panel

Gambar 4 Peta Penduduk Rata-Rata Jumlah Penduduk Tertinggi, Sedang nan Terendah di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jateng dalam Tahun 2008-2013



Sumber: Tabel 1

- X₁₁ = Variabel Belanja Barang diberi kode Bljbrg
- X₁₂ = Variabel Belanja Hibah diberi kode BljHbah
- X₁₃ = Variabel Bantuan Sosial diberi kode Bansos
- X₂₁ = Variabel Belanja Peralatan dan Mesin diberi kode Peralmes
- X₂₂ = Variabel Belanja Bangunan dan Gedung diberi kode Banged
- X₂₃ = Variabel Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan diberi kode Jairjar
- X₂₄ = Variabel Belanja Aset Tetap Lainnya diberi kodeAsttl
- X₃ = Variabel Realisasi Investasi Swasta diberi kode Reinswsy
- b₁₁ = Koefisien regresi Belanja Barang
- b₁₂ = Koefisien regresi Belanja Hibah
- b₁₃ = Koefisien regresi Bantuan Sosial
- b₂₁ = Koefisien regresi Belanja Peralatan dan Mesin
- b₂₂ = Koefisien regresi Belanja Bangunan dan Gedung
- b₂₃ = Koefisien regresi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- b₂₄ = Koefisien regresi Belanja Aset Tetap Lainnya
- b₃ = Koefisien regresi Realisasi Investasi Swasta
- e = Error term
- t = Tahun 2008 sampai dengan 2013
- I = 35 Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah

3.5.2. Metode Estimasi Model Regresi Panel

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Setelah melalui estimasi model regresi maka dilakukan pemilihan Model Fixed Effect. Model ini kemudian dilakukan Uji Hausman. Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah Model Fixed Effect yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

$$H_0 : \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 : \text{Fixed Effect Model}$$

Uji Hausman akan mengikuti distribusi *chi-squares* sebagai berikut

$$m = \hat{q}Var(\hat{q}) - 1\hat{q}$$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom*. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H₀ ditolak dan model yang tepat adalah Model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam deskripsi daerah penelitian disajikan gambaran 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah tentang luas masing-masing kabupaten kota, jumlah penduduk dalam periode yang relevan dengan analisis penelitian, tingkat kemiskinan yang terdapat di masing-masing kabupaten kota serta besaran

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten Kota di Provinsi Jateng tahun 2008-2013
(dalam ribuan)

Kabupaten Kota	Jumlah Penduduk Miskin					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab Banjarnegara	200,6	184,0	166,7	177,30	167,0	166,8
Kab Banyumas	340,7	319,8	314,2	328,50	309,8	296,8
Kab Batang	122,0	112,2	103,6	95,30	89,8	87,5
Kab Blora	155,1	146,0	135,0	134,90	127,1	123,8
Kab Boyolali	158,4	148,2	127,8	139,00	131,5	126,5
Kab Brebes	459,3	432,4	398,8	294,40	371,4	367,9
Kab Cilacap	343,9	318,8	297,2	282,00	265,7	255,7
Kab Demak	217,2	202,2	198,9	192,50	181,6	172,5
Kab Grobogan	262,0	247,5	233,8	227,80	214,6	199,0
Kab Jepara	119,2	104,7	111,9	113,30	107,0	106,9
Kab Karanganyar	125,9	118,8	113,8	124,50	117,4	114,4
Kab Kebumen	334,9	309,6	263,1	279,40	262,8	251,1
Kab Kendal	168,2	152,4	130,4	128,60	121,2	117,7
Kab Klaten	243,1	220,2	197,4	203,10	191,3	179,5
Kab Kudus	97,8	84,9	70,2	73,60	69,3	70,1
Kab Magelang	190,8	176,5	167,3	179,60	169,4	171,0
Kab Pati	207,2	184,1	172,4	175,10	165,0	157,9
Kab Pekalongan	164,3	151,6	136,6	125,90	118,6	116,5
Kab Pemaslalg	325,2	303,7	251,9	261,20	245,9	246,8
Kab Purbalingga	221,9	205,0	209,0	196,00	184,9	181,1
Kab Purworejo	130,0	121,4	115,4	121,90	114,8	109,0
Kab Rembang	154,7	147,2	138,6	140,40	132,4	128,0
Kab Semarang	102,5	96,7	97,9	96,00	90,6	83,2
Kab Sragen	177,1	167,3	149,8	154,30	145,3	139,0
Kab Sukoharjo	99,1	94,4	90,2	92,00	85,7	84,1
Kab Tegal	220,7	195,5	182,5	161,10	151,7	149,8
Kab Temanggung	114,7	105,8	95,4	94,90	89,5	91,1
Kab Wonogiri	201,1	184,9	145,6	146,40	137,9	132,2
Kab Wonosobo	207,5	194,0	174,8	183,00	172,4	170,1
Kota Magelang	14,9	13,7	12,4	13,10	12,3	11,8
Kota Pekalongan	28,0	23,3	26,4	28,30	27,3	24,1
Kota Salatiga	14,9	14,1	14,2	13,30	12,6	11,5
Kota Semarang	89,6	73,1	79,7	88,50	83,3	86,7
Kota Surakarta	83,4	78,0	69,9	64,50	60,7	59,7
Kota Tegal	26,8	23,4	25,7	25,90	24,4	21,6
Jumlah	6.122,7	5.655,4	5.218,5	5.155,6	4.952,1	4.811,3

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2009-2014, BPS Provinsi Jawa Tengah

pengeluaran pemerintah ditinjau dari variabel yang dianalisa.

4.1. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sebanyak 32.751.648 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.006 jiwa per km². Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebanyak 32.995.284 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.013 jiwa per km². Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 32.525.463 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 999 jiwa per km². Secara lengkap jumlah penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel 1.

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sebanyak 32.787.946 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.008 jiwa per km². Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebanyak 33.272.219 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.022 jiwa per km². Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebanyak 33.257.655 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.022 jiwa per km². Dalam gambar berikut dapat dijelaskan kondisi daerah yang memiliki penduduk tertinggi, sedang dan terendah dari rata-rata tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 seperti dalam gambar 4.

Berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada dalam masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dari data yang ada maka dapat dikategorikan

dalam jumlah penduduk tinggi, sedang dan rendah. Adapun batasan diperoleh dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah kabupaten kota, kemudian hasilnya dibagi menjadi tiga yang selanjutnya disebut kategori tinggi, sedang dan rendah. Hal yang sama juga dilakukan pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kota dalam Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Secara umum jumlah penduduk miskin Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2008 sampai dengan 2013 mengalami trend yang selalu menurun apabila dibandingkan dari persentase jumlah penduduk miskin seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin masing-masing kabupaten kota. deskripsi dari jumlah penduduk miskin kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.

Rata-rata selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 jumlah penduduk miskin pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kategori tinggi dengan jumlah antara 311 ribu jiwa sampai 157 ribu jiwa. Kategori sedang dengan jumlah antara 154,8 ribu jiwa sampai 104 ribu jiwa. Kategori rendah dengan jumlah antara 97,9 ribu jiwa sampai 11,7 ribu jiwa. Adapun kategori penduduk miskin tertinggi, sedang dan rendah dapat dilihat dalam gambar 5.

Belanja barang termasuk dalam kelompok Belanja Konsumsi yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan

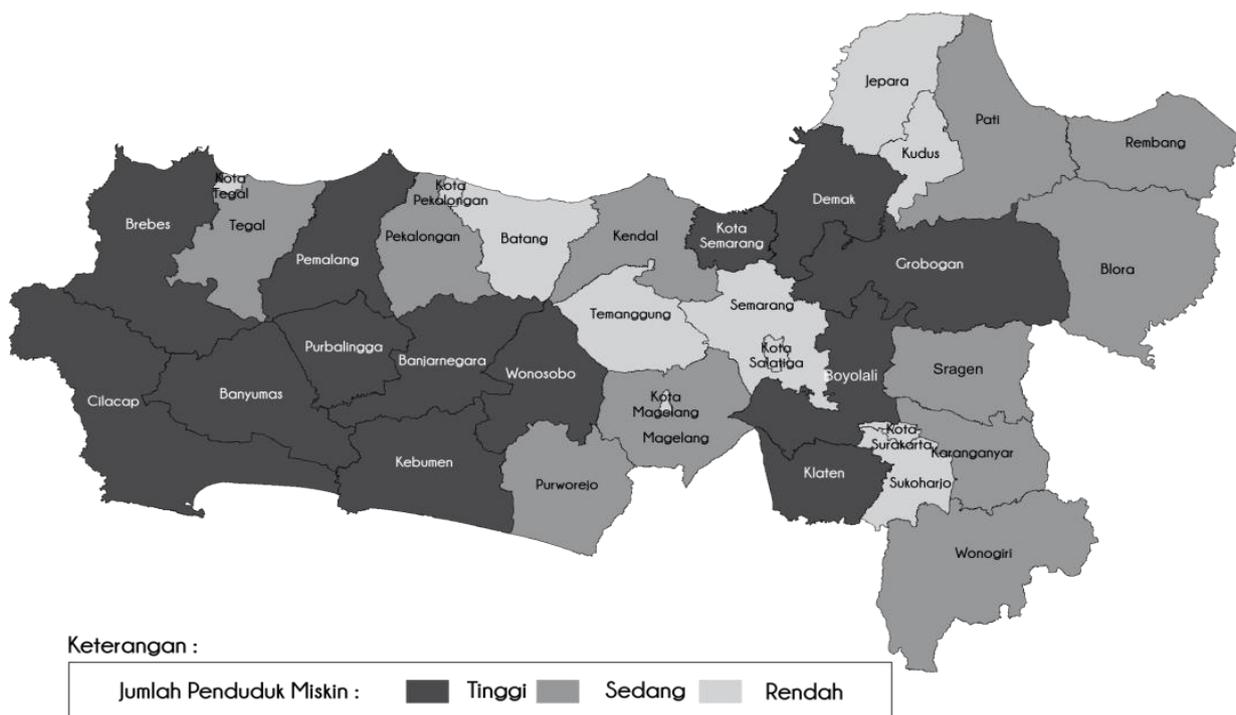
pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor. Belanja Bangunan dan Gedung adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan. Untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan seperti halnya belanja lainnya.

Belanja Aset Tetap Lainnya adalah Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja sebelumnya. Realisasi investasi swasta ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang

Gambar 5 Peta Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi, Sedang dan Terendah di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jateng dalam Tahun 2008-2013



Sumber: Tabel 2

Tabel 3 Metode *Fixed Effect Model* Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Realisasi Investasi Swasta terhadap Kemiskinan Tahun 2008-2013

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.584	5.448	29.079,951	0,000000
BLJBRG	(14.886.382)	9.631.393	(1.545,611)	0,125097
BLJHBAH	(182.407.701)	72.644.476	(2.510,965)	0,013507
BANSOS	240.679.463	65.809.073	3.657,238	0,000394
PERALMES	(208.807.424)	77.502.792	(2.694,192)	0,008173
BANGED	(5.304.750)	45.237.744	(1.172,638)	0,243497
JAIRJAR	30.940.600	46.431.366	0,666	0,506581
ASTTL	(293.462.811)	273.774.828	(1.071,913)	0,286127
REINSWS	59.542	21.323	2.792,386	0,006181
R-squared	0,9799	Mean dependent var		1.480,713
Adjusted R-squared	0,7214	S.D. dependent var		8.672,232
S.E. of regression	1.447	Akaike info criterion		8.416,063
Sum squared resid	2.284	Schwarz criterion		9.271,503
Log likelihood	-5.966	Hannan-Quinn criter.		8.763,572

berskala nasional yang ada di tiap-tiap kabupaten kota dalam Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Investasi Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahun oleh pemerintah daerah.

4.3. Analisis Statistik Kuantitatif Pengeluaran Pemerintah dan investasi swasta terhadap Tingkat Kemiskinan

Metode Regresi Data Panel digunakan dengan analisa Metode *Fixed Effect Model*. Dalam Model ini dijelaskan variabelnya meliputi Belanja Barang yang disingkat *Bljbrg*, Belanja Hibah yang disingkat *BljHbah*, Bantuan Sosial yang disingkat *Bansos*, Belanja Peralatan dan Mesin yang disingkat *Peralmes*, Belanja Bangunan Gedung yang disingkat *Banged*, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan yang disingkat *Jairjar*, Belanja Aset Tetap Lainnya yang disingkat *Asttl* dan Realisasi Investasi Swasta yang disingkat *Reinsws*. Adapun ringkasan hasil estimasi untuk model diperlihatkan pada tabel 3.

Dengan hasil Uji Hausman dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Hausman Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Realisasi Investasi Swasta terhadap Kemiskinan Tahun 2008-2013

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.134	-34,109	0,0000
Cross-section Chi-square	5.463	34	-

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square*, hasil perbandingan selengkapnya ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 5 Hasil Perbandingan Uji Hausman dengan *Chi-Square* Tabel

Chi Square hitung (Hausman Test)	Sign	Chi-Square Tabel	Kesimpulan
X = 34.3392	>	15,50731	H ₀ ditolak, dengan demikian model yang dipilih adalah fixed effect model

Tahap berikutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Normalitas. Dengan analisis grafik atau *histogram analysis* terlihat bahwa grafik membentuk gambar seperti lonceng

Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀ : Data berdistribusi normal

H₁ : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari $J_{hitung} > Chi\ Square_{tabel}$, maka H₀ ditolak, hasilnya adalah $J_{hitung} (25,623) > Chi\ Square_{tabel}, (15,50731)$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal atau mendekati normal.

Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya untuk Uji Multikolinearitas. Adapun hasil perbandingan uji multikolinearitas variabel pengeluaran pemerintah, realisasi investasi swasta dan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 6.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas atau tidak maka dengan membandingkan nilai R-squared dan tabel X²:

- Jika nilai R-squared > X² tabel, maka tidak lolos uji heteroskedastisitas.

- Jika nilai R-squared < X^2 tabel, maka lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil *Heteroskedasticity Test* variabel Pengeluaran Pemerintah, Realisasi Investasi Swasta dan Kemiskinan

Obs*R-squared	49.45619	Prob. Chi-Square (44)	0.2645
R-squared	0,9831	Mean dependent var	1.480,713
R-squared	0,9799	Durbin-Watson stat	2,189
Prob(F-statistic)	0,0000	F-statistic	1.264

Hasil analisa menyebutkan bahwa nilai R-squared (49.45619) > X^2 tabel (15,50731), maka lolos uji heteroskedastisitas atau dapat dijelaskan pula bahwa Dengan melihat nilai atau *value chi square* 0,2645 bahwa lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW). Dengan melihat nilai Durbin Watson pada Model Fixed Effect sebesar 2,189,014. Apabila melihat tabel Durbin Watson dengan n=154, K=8, maka diperoleh nilai dL 1,622 dan dU 1,847, sehingga nilai 4-dU sebesar 2,030 (4-1,857) dan nilai 4-dL sebesar 2,378 (4-1,622). Dilihat pakai grafik. Setelah dilihat ternyata nilai Durbin Watson terletak antara di wilayah 4-dU dan 4-dL sehingga tidak ada kesimpulan maka disimpulkan model ini tidak mengandung masalah autokorelasi.

Tabel 7 Hasil Uji *Durbin Watson* (Uji DW) Variabel Pengeluaran Pemerintah, Realisasi Investasi Swasta dan Kemiskinan

R-squared	0.9831	Mean dependent var	1.480
Adjusted R-squared	0.9755	Durbin-Watson stat	2,189
Prob (F-statistic)	0.000000	F-statistic	1.264

Selanjutnya dapat dilakukan uji estimasi linier berganda dan diinterpretasikan. Untuk Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan realisasi investasi sektor swasta terhadap Tingkat Kemiskinan dari hasil analisa diperoleh hasil persamaan sebagai berikut :

$$\text{KMSKNAN} = 158,431796626 - 1,4886\text{BLJBRG} - 1,8240\text{BLJHBAH} + 2,4067\text{BANSOS} - 2,0880\text{PERALMES} - 5,3047\text{BANGED} + 3,09406\text{JAIRJAR} - 2,93462\text{ASTTL} + 5,9541\text{REINSWS}$$

Persamaan tersebut diperoleh dari Model Fixed Effect yang diasumsikan sesuai dengan analisa yang diharapkan. Adjusted R squared : 0,7214 yang berarti bahwa variasi Variabel Belanja Barang, Variabel Belanja Hibah, Variabel Belanja Bantuan Sosial,

Variabel Belanja Peralatan dan Mesin, Variabel Belanja Bangunan dan Gedung, Variabel Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Variabel Belanja Aset Tetap Lainnya dan Variabel Realisasi Investasi Swasta mampu menjelaskan variasi variabel Tingkat Kemiskinan sebesar 98,31 persen sedangkan sisanya sebesar 0,2786 persen merupakan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Uji F

$F_{\text{Statistik}}$: dibandingkan dengan f_{tabel} , lalu jika lebih besar maka Variabel Bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. (signifikan karena prob 0,00 < $\alpha=0,05$). Dari hasil perhitungan yang menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha= 5$ persen) dengan *degree of freedom for numerator* (dfn) = 8 (k-1 = 9-1) dan *degree of freedom for denominator* (dfd)= 145 (n-k = 154-9) maka F_{tabel} sebesar 2,00 diperoleh $F_{\text{Statistik}}(126,4) > f_{\text{tabel}}(2,00)$ sehingga Variabel Bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. Uji F ini juga menjelaskan ketepatan model yang digunakan dalam analisis ini.

4.4.2. Uji t

4.4.2.1. Variabel belanja hibah dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh variabel Belanja Hibah terhadap tingkat kemiskinan

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ tidak ada pengaruh variabel Belanja Hibah terhadap tingkat kemiskinan.

Jika : $t_{\text{-stat}} > t_{\text{-tabel}} : H_0$ ditolak, H_a diterima
 $t_{\text{-stat}} < t_{\text{-tabel}} : H_0$ diterima, H_a ditolak

kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $\rho_{\text{value}}(\text{tingkat signifikan}) > 0,05$

H_1 ditolak jika $\rho_{\text{value}}(\text{tingkat signifikan}) < 0,05$.

Nilai t_{hitung} dari Belanja hibah sebesar -0,7722 dan t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha=5$ persen) sebesar 1.545,611 sehingga $t_{\text{hitung}} (-0,7722) < t_{\text{tabel}} (1.545,611)$ hal ini berarti semakin tinggi belanja hibah akan menurunkan tingkat kemiskinan. Koefisien regresi variabel belanja hibah sebesar -0,7722 berarti bahwa setiap peningkatan belanja hibah sebesar 1 miliar akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,7722 dengan asumsi ceteris paribus pada variabel lain.

4.4.2.2. Variabel Bantuan Sosial dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh variabel Bantuan Sosial terhadap tingkat kemiskinan

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ tidak ada pengaruh variabel Bantuan Sosial terhadap tingkat kemiskinan.

Jika : $t_{\text{-stat}} > t_{\text{-tabel}} : H_0$ ditolak, H_a diterima
 $t_{\text{-stat}} < t_{\text{-tabel}} : H_0$ diterima, H_a ditolak

kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $\rho_{\text{value}}(\text{tingkat signifikan}) > 0,05$

H_1 ditolak jika ρ_{value} (tingkat signifikan) $< 0,05$.
Nilai t_{hitung} dari Bantuan Sosial sebesar 3.657,238 dan t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha=5$ persen) sebesar 1,65543 sehingga $t_{\text{hitung}} (3.657,238) > t_{\text{tabel}} (1,65543)$ hal ini berarti semakin tinggi Bantuan Sosial akan menaikkan pula tingkat kemiskinan. Koefisien regresi variabel Bantuan Sosial sebesar 3.657,238 berarti bahwa setiap peningkatan Bantuan Sosial sebesar 1 miliar akan menyebabkan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 3.657,238 dengan asumsi *ceteris paribus* pada variabel lain.

4.4.2.3. Variabel belanja peralatan dan mesin dengan hipotesis sebagai berikut

$H_0 : \beta_4 = 0$ tidak ada pengaruh variabel Belanja peralatan dan mesin terhadap tingkat kemiskinan

$H_1 : \beta_4 \neq 0$ tidak ada pengaruh variabel Belanja peralatan dan mesin terhadap tingkat kemiskinan.

Jika : $t\text{-stat} > t\text{-tabel} : H_0$ ditolak, H_a diterima
 $t\text{-stat} < t\text{-tabel} : H_0$ diterima, H_a ditolak

kriteria pengujian :

H_0 diterima jika ρ_{value} (tingkat signifikan) $> 0,05$

H_1 ditolak jika ρ_{value} (tingkat signifikan) $< 0,05$.

Nilai t_{hitung} dari Belanja peralatan dan mesin sebesar 2.694,192 dan t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha=5$ persen) sebesar 1,65543 sehingga $t_{\text{hitung}}(2.694,192) > t_{\text{tabel}} (1,65543)$ hal ini berarti semakin tinggi belanja peralatan dan mesin akan menurunkan tingkat kemiskinan. Koefisien regresi variabel belanja peralatan dan mesin sebesar 2.694,192 berarti bahwa setiap peningkatan belanja peralatan dan mesin sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2.694,192 dengan asumsi *ceteris paribus* pada variabel lain.

4.4.2.4. Variabel Realisasi Investasi sektor swasta dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_8 = 0$ tidak ada pengaruh variabel Realisasi Investasi sektor swasta terhadap tingkat kemiskinan

$H_1 : \beta_8 \neq 0$ tidak ada pengaruh variabel Realisasi Investasi sektor swasta terhadap tingkat kemiskinan.

Jika : $t\text{-stat} > t\text{-tabel} : H_0$ ditolak, H_a diterima
 $t\text{-stat} < t\text{-tabel} : H_0$ diterima, H_a ditolak

kriteria pengujian :

H_0 diterima jika ρ_{value} (tingkat signifikan) $> 0,05$

H_1 ditolak jika ρ_{value} (tingkat signifikan) $< 0,05$.

Nilai t_{hitung} dari Realisasi Investasi sektor swasta sebesar 2.792,386 dan t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha=5$ persen) sebesar 1,65543 sehingga $t_{\text{hitung}} (2.792,386) > t_{\text{tabel}} (1,65543)$ hal ini berarti semakin tinggi Realisasi Investasi sektor swasta akan menaikkan pula tingkat kemiskinan. Koefisien regresi variabel Realisasi Investasi sektor swasta sebesar 2.792,386 berarti bahwa setiap peningkatan Realisasi Investasi sektor swasta sebesar 1 miliar akan menyebabkan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar

2.792,386 dengan asumsi *ceteris paribus* pada variabel lain.

4.5. Pembahasan

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat dijelaskan pengaruh pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi dan realisasi investasi sektor swasta sebagai berikut:

- Belanja barang yang merupakan bagian dari belanja konsumsi pemerintah mampu mempengaruhi secara negatif sesuai dengan hipotesa namun tidak signifikan .
- Belanja Hibah yang merupakan bagian dari belanja konsumsi pemerintah mampu mempengaruhi secara negatif sesuai dengan hipotesa dengan perhitungan setiap 1 orang penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah yang diantaskan pemerintah perlu melakukan belanja hibah sebesar Rp.182.407.701,-.
- Bantuan Sosial yang merupakan bagian dari belanja konsumsi pemerintah mempengaruhi secara positif sehingga tidak sesuai dengan hipotesa bahwa setiap belanja bantuan sosial sebesar Rp.240.679.463,- malah akan menambah 1 orang penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini diluar kemampuan peneliti sehingga tidak bisa menginterpretasikan hasil analisis bantuan sosial, maka berpotensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel bantuan sosial.
- Belanja Peralatan dan Mesin yang termasuk dalam belanja investasi pemerintah mempengaruhi secara positif sehingga tidak sesuai dengan hipotesa bahwa setiap 1 orang penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah yang diantaskan pemerintah perlu melakukan belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.208.807.424,-. Hal ini terjadi karena sesuai dengan karakter belanja peralatan dan mesin diadakan sebagai bagian dari investasi pemerintah untuk usaha yang tidak secara langsung bisa dimanfaatkan dalam pengentasan kemiskinan seperti misalnya teknologi informasi. Kondisi ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya penerapan teknologi, terdapat pengurangan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang berdampak pada bertambahnya kemiskinan, karena tadinya bekerja menjadi tidak bekerja karena proses otomatisasi dari peralatan yang dipergunakan. Kelompok pengeluaran pemerintah pada belanja peralatan dan mesin ini perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaannya dengan memprioritaskan kebutuhan tersebut sehingga tidak semakin menimbulkan masalah kemiskinan.
- Belanja Bangunan dan Gedung yang termasuk dalam belanja investasi pemerintah mampu mempengaruhi secara negatif sesuai dengan hipotesa bahwa setiap 1 orang penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah yang diantaskan pemerintah perlu melakukan belanja

bangunan dan gedung sebesar Rp.5.304.750,-. Hal ini terjadi karena sesuai dengan belanja bangunan dan gedung diadakan sebagai bagian dari investasi pemerintah untuk usaha yang memberikan multiplier efek dalam jangka panjang seperti misalnya bangunan sekolah atau rumah susun.

- f. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk dalam belanja investasi pemerintah mampu mempengaruhi positif sehingga tidak sesuai dengan hipotesa bahwa setiap 1 orang penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah yang diantaskan pemerintah perlu melakukan belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.30.940.600,-. Hal ini terjadi karena proyek tersebut umumnya dilaksanakan oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut dalam melaksanakan pekerjaan sudah memiliki sistem secara internal sehingga tidak mampu mempengaruhi secara spontan terhadap kemiskinan dimana investasi tersebut dilaksanakan.
- g. Belanja Aset Tetap Lainnya yang termasuk dalam belanja investasi pemerintah mampu mempengaruhi secara negatif sehingga sesuai dengan hipotesa, bahwa setiap 1 orang penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah yang diantaskan pemerintah perlu melakukan belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.293.462.811,-. Hal ini terjadi karena sesuai dengan Aset Tetap Lainnya diadakan untuk usaha yang memberikan multiplier efek dalam jangka panjang seperti misalnya belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
- h. Realisasi Investasi Swasta yang mampu mempengaruhi positif sehingga tidak sesuai dengan hipotesa dengan perhitungan apabila Realisasi Investasi Swasta dinaikkan sebesar 1 miliar rupiah maka akan menambah jumlah kemiskinan sebanyak 59 penduduk, dengan kata lain setiap realisasi investasi swasta sebesar Rp.59.542.000,- malah akan menambah 1 orang penduduk miskin di 35 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena proyek investasi swasta tersebut umumnya dilaksanakan oleh pihak swasta yang berorientasi pasar, dimana swasta tersebut dalam melaksanakan pekerjaan sudah memiliki sistem secara internal sehingga tidak mampu mempengaruhi secara spontan terhadap kemiskinan dimana investasi tersebut dilaksanakan.

Penekanan pada hasil negatif dan positif tidak dalam definisi bahwa negatif itu tidak baik dan positif itu sebaliknya, dalam konteks ini lebih kepada hubungan antara variabel dependen dan independen dari hasil pengembangan hipotesis. Hubungan negatif antara variabel dependen dan independen menjelaskan bahwa variabel belanja tersebut memang memiliki manfaat untuk pengurangan tingkat

kemiskinan dan sebaliknya apabila positif justru akan menambah tingkat pengangguran.

Dengan hasil penelitian ini maka mampu menjelaskan teori Keynes bahwa intervensi Pemerintah merupakan pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor bersih. Pertumbuhan pendapatan tersebut digunakan sebagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan yang secara rinci dijelaskan melalui variabel belanja barang, variabel belanja hibah, variabel belanja bangunan gedung dan variabel belanja aset tetap lainnya. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, namun penelitian terdahulu sebatas pada akumulasi pengeluaran pemerintah, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan secara lebih terperinci dalam kelompok pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiyawati (2007) Untuk pengujian secara langsung Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan berpengaruh menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Irawati (2011), menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang pro poor khususnya terkait dengan bidang sosial dan infrastruktur masih harus ditingkatkan dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah di masing-masing provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin khususnya sehingga bisa memperbaiki tingkat kemiskinan. Penelitian Sodik (2007) dengan menggunakan data panel 26 provinsi tahun 1993 – 2003 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang berimplikasi pada pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sinurat, (2013), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah terhadap sektor ekonomi, infrastruktur dan pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sedangkan untuk sektor kesehatan malah sebaliknya diduga belanja pemerintah untuk kesehatan baru menurunkan tingkat kemiskinan untuk jangka panjang.

Namun ada tiga variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan yaitu variabel bantuan sosial, belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Realisasi Investasi Swasta dengan metode *Period weights (PCSE) standard errors and covariance (d.f. corrected)*.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Pengeluaran pemerintah secara umum baik pengeluaran konsumsi yang dalam penelitian ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial maupun pengeluaran investasi yang dalam penelitian ini terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan realisasi investasi sektor swasta pada 35 Kabupaten

Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan. Beberapa daerah memang ada yang tidak mengalokasikan untuk belanja tertentu karena proses transisi aturan pemerintah yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian di daerah. Sementara pemahaman daerah cukup beragam sehingga keadaan tersebut terjadi. Sejalan dengan hal tersebut tingkat kemiskinan mengalami penurunan dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Penurunan tersebut terjadi secara umum di 35 kabupaten kota dalam Provinsi Jawa Tengah. 2) Perlu tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan belanja pemerintah yang mana sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Namun pengeluaran pemerintah kelompok konsumsi yaitu bantuan sosial perlu mendapatkan perhatian karena hasilnya justru menambah tingkat kemiskinan. Pada kelompok belanja investasi yaitu belanja peralatan mesin dan belanja jalan irigasi jaringan terjadi sehingga tidak mampu mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di daerah dimana pelaksanaan pekerjaan terkait belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut dilaksanakan. Realisasi investasi sektor swasta pun tidak serta merta secara spontan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan karena dalam pelaksanaannya para investor cenderung sudah memiliki sistem yang terencana dan berorientasi pasar

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dalam perkembangannya membutuhkan perbaikan-perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah pada hasil analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dari kelompok konsumsi yaitu bantuan sosial dan pengeluaran pemerintah dari kelompok investasi yaitu peralatan mesin baik terhadap tingkat kemiskinan yang belum berdampak. Ketersediaan data yang kurang lengkap juga diasumsikan menjadi sebab terbatasnya penelitian ini.

6.1. Saran

Memperhatikan kesimpulan mengenai pengeluaran pemerintah, realisasi investasi sektor swasta dan tingkat kemiskinan maka disarankan 1) Pemerintah bersama-sama stakeholder perlu lebih mengoptimalkan pengeluaran pemerintah pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan melalui evaluasi serta tindak lanjut secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap sistem, tatakerja serta sumber daya manusianya. 2) Pemerintah bersama-sama dengan stakeholder harus secara aktif melakukan upaya-upaya melakukan kerjasama dengan kabupaten dan kota lainnya sehingga memiliki sinergi dalam rangka melaksanakan pembangunan di masing-masing daerah namun berdampak positif terhadap daerah lain sehingga hasil yang diperoleh dapat secara nyata meningkatkan produktifitas daerah. 3) Pemerintah

perlu meningkatkan program kegiatan yang bersumber pada belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja aset tetap lainnya karena pengeluaran pemerintah tersebut mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. 4) Pemerintah perlu memperbaiki regulasi terhadap investasi sektor swasta yang berpihak pada penurunan tingkat kemiskinan karena penurunan tingkat kemiskinan tidak semata-mata karena peranan pengeluaran pemerintah tetapi peran swasta juga ada dalam bentuk investasi tersebut serta meningkatkan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar yang memiliki karakteristik yang hampir sama dalam menawarkan paket-paket investasi.

DAFTAR PUSTAKA :

- Agus Widarjono, 2007, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu*, Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. STIE-YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2011, *"Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010"*, Semarang, katalog BPS : 3205008.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2008, *"Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota 2007-2008"*, Semarang, katalog BPS : 7203003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2010, *"Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota 2009-2010"*, Semarang, katalog BPS : 7203003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2011, *"Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota 2010-2011"*, Semarang, katalog BPS : 7203003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2012, *"Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota 2011-2012"*, Semarang, katalog BPS : 7203003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013, *"Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota 2012-2013"*, Semarang, katalog BPS : 7203003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2014, *"Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota 2013-2014"*, Semarang, katalog BPS : 7203003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2011, *"Data dan Informasi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011"*, Semarang, katalog BPS : 44050038.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2011, *"Profil Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah"*, Semarang.
- Bayai, Innocent and Davis Nyangara. 2013. *An Analysis of Determinants of Private Investment in Zimbabwe For The Period 2009-2011*.

- International Journal of Economics and Management Sciences, 2(6).
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlanga, Jakarta
- Boivin, Jean and Marc Giannoni, 2002, "Assessing Changes in the Monetary Transmission Mechanism: A VAR Approach," *Economic Policy Review FRBNY*, May
- Bungin, Burhan, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Degol Hailu and John Weeks, 2011, "Macroeconomic Policy for Growth and Poverty Reduction: An Application to Post-Conflict and Resource-Rich Countries", DESA Working Paper No. 108, UNDP.
- Deliarnov. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Diulio, Eugene A. 1993. *Teori Makro Ekonomi*. Cetakan keempat. Jakarta : Erlangga
- Eric Mayer, Stéphane Moyen, Nikolai Stähler, 2010, "Government expenditures and unemployment: a DSGE perspective", Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main.
- Ghozali, Imam. 2006. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang : Badan Penerbit Undip
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, 2006. "Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang", *Jurnal Manajemen Usahawan*, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal.42.
- Irawati, Siti Nurlela, 2011. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2007-2011)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
- Jean Hindriks and Gareth D. Myles, 2004, "Intermediate Public Economics", [MIT Press](#), USA
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, terjemahan D. Guritno*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kodoatie, Johanna Maria. 1998. *An Analysis of Foreign Direct Investment in Indonesia (1971- 1994)*. Media Ekonomi dan Bisnis, X(1-2).
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum
- Mankiw, N. Greorgy. 2000. *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Alih Bahasa : Imam Nurmawam. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Merton H. Miller And Franco Modigliani, 1961, *Dividend Policy, Growth, And The Valuation Of Shares*, The Journal of Business, Vol. 34, No. 4 (Oct., 1961), pp. 411-433
- M. Suparmoko, 2001, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit :Andi
- Mthuli Ncube, John Anyanwu and Kjell Hausken, 2013, "Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA)", African Development Bank Angle de l'avenue du Ghana et des rues Pierre de Coubertin et Hédi Nouira
- Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. 1989, *Public Finance in Theory and Practise*. Mc Graw Hill Book Company.
- Myrdal, Gunnar. 1976. *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta. P.T. Gramedia.
- Nanga, Muana. (2005). *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada.
- Nazar Dahmardeh, Mahmoud Hashemi Tabar, 2013, "Government Expenditures and its Impact on Poverty Reduction (Empirical From Sistan and Baluchestan Province of Iran)", International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2226-3624.
- Nopirin., 1993. *Ekonomi Moneter. Edisi 4. Cetakan Kedua*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Odubunmi Ayoola Sunkanmi (Ph.D), Omobitan Olufunsho Abayomi (Ph.D), 2014, "Testing Public Expenditure and Poverty Reduction Nexus in Nigeria", *Developing Country Studies* ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) Vol.4, No.6, 2014, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Lagos State University, Ojo, Lagos, Nigeria.
- Ozoana Ifeanyi.C, 2013, "The Impact Of Public Spending On Poverty Reduction In Nigeria [1980-2011]", Department Of Economics Caritas University Amorji-Nike Emene Enugu State.
- Radianto, Elia. 1995. *Spesifikasi Dinamis, Model Investasi Jangka Panjang; Sebuah Studi Kasus di Maluku*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 10
- Rafael Doménech and José Ramón García, 2007, "Unemployment, Taxation and Public Expenditure in OECD Economies", University of Valencia
- Peter C. Young & Diego J. Pedregal, 2013, "Macroeconomic Relativity: Government Spending, Private Investment and Unemployment in the USA", Structural Change and Economic Dynamics, Environmental Science Division Lancaster University, Lancaster LA1 4YQ, UK
- R. Preston McAfee & Tracy R. Lewis, 2009, "Introduction to Economic Analysis", eISBN: 978-1-4533-2690-9, [Flat World Knowledge](#), Washington, DC.
- Reksoprayitno, Soediyono, 2000. *Ekonomi Makro*, Yogyakarta : Penerbit BPFE.

- Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 1996. *Makro Ekonomi. Edisi ke- 17. Cetakan ketiga.* Jakarta: Erlangga
- Sasana, Hadi. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah.* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 1(1)
- Setyawati, Anis, 2007. *Analisis PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur,* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4, No. 2, hal. 211-228
- Sinurat Desmon, 2013. *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur,* Satya Wacana University Press, Salatiga.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas.* Rajawali Press: Jakarta.
- Sushanta K. Mallick, 2008, "A macroeconomic policy approach to poverty reduction", School of Business and Management, Queen Mary, University of London, UK.
- Sutawijaya Adrian dan Zulfahmi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia,* Trikonomika Volume 12, No. 1, Juni 2013, Hal. 32-39
- Tejo Birowo, 2011, "Relationship Between Government Expenditure And Poverty Rate In Indonesia Comparison of Budget Classifications Before and After Budget Management Reform in 2004", School Of Asia Pacific Studies Ritsumeikanasia Pacific University Japan
- TKPK, "Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010", 2011, Semarang, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah
- TKPK, "Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011", 2012, Semarang, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Edisi 7. Jakarta. Erlangga.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2014, "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014", Semarang.
- Ringkasan Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2007-2013
- Zaris, Roeslan. 1987. *Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: LPFE UI
- Peraturan-peraturan :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 59 /PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2006.